

# JGOP



## JOURNAL OF GOVERNMENT AND POLITICS

VOLUME 4, NOMOR 2 DESEMBER 2022

ISSN 2774-728X (PRINT) ISSN: 2686-3391 (ONLINE)



JGOP.FISIP@UMMAT.AC.ID

In Cooperation With





Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391

Vol. 4 No. 2 Desember 2022

## Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



---

### Faksionalisasi Partai Politik Golkar Di Kalimantan Timur Indonesia

Jauchar B<sup>1</sup>, Jumansyah<sup>2,3</sup>, Arini Hidayati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Universitas Mulawarman

---

#### InfoArtikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 19-08-2021

Disetujui: 13-09-2022

Dipublikasikan :

**18-12-2022**

---

Kata Kunci :

***Faksionalisasi; Partai Politik; Konflik Internal; Golkar Kaltim.***

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai adanya kecenderungan terbentuknya faksi di dalam partai politik Golkar di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan studi literature dengan menggumpulkan data melalui media massa yang kredibel serta konkrit membahas mengenai konflik tersebut. Selain itu didukung dengan laporan dan google form untuk membuat persepsi masyarakat terkait konflik ini. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini bahwa konflik yang terjadi di internal partai Golkar yaitu melibatkan faksi Golongan muda yang dipimpin Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudi Masud dan faksi golongan senior yang direpresentasikan Makmur HAPK. Inilah yang menyebabkan kecederungan disebutkan adanya faksi dalam internal partai golkar, karena representasi golongan yang terlihat di publik memunculkan dua figur tersebut yaitu dari golongan muda dan senior. Konflik yang terjadi bisa dikategorikan dalam faksionalisasi kompetitif. Munculnya faksi bisa disebabkan karena adanya perebutan posisi kunci yang terbatas untuk menunjang politik karir dan ini biasanya tidak terlepas karena adanya pengaruh kepentingan elit-elit yang pragmatis. Selain itu penulis mengidentifikasi bahwa konflik ini juga muncul karena adanya motivasi kesejahteraan dalam dilemma kolektivitas partai vs individu. Jika kondisi partai yang buruk ini tidak dipulihkan maka berbagai bentuk kerja sama digantikan dengan perebutan yang mengancam stabilitas partai dan mengiring ke arah degeneratif.

---

---

***Factionalization Of The Golkar Political Party In East Kalimantan, Indonesia***

---

**Abstract**

*This study describes the tendency to form factions within the Golkar political party in East Kalimantan. This study uses a literature study by collecting data through credible and concrete mass media discussing the conflict. In addition, it is supported by reports and google forms to create public perceptions regarding this conflict. Based on the findings of this study, the internal conflicts of the Golkar party involved the youth group faction led by the Chairman of the DPD Golkar Kaltim, Rudi Masud and the senior group faction represented by Makmur HAPK. This is what causes the tendency to mention the existence of factions within the Golkar party, because the representation of groups that is seen in public gives rise to these two figures, namely young and senior groups. Conflicts that occur can be categorized in competitive factionalization. The emergence of factions can be caused by the struggle for limited key positions to support career politics and this usually cannot be separated from the influence of the interests of pragmatic elites. In addition, the authors identify that this conflict also arises because of the welfare motivation in the collective vs individual collectivity dilemma. If the bad condition of the party is not restored, then various forms of cooperation will be replaced by struggles that threaten the stability of the party and lead to degeneration.*

---

\*Alamat Korespondensi:

[jauchar@fisip.unmul.ac.id](mailto:jauchar@fisip.unmul.ac.id)

**PENDAHULUAN**

Faksionalisasi partai merupakan gejala yang wajar dan sulit untuk dihindari keberadaannya. Dapat dikatakan bahwa hampir semua partai di Indonesia telah menjadi korban faksionalisme serius yang kadang berujung pada perpecahan. Terkadang partai politik juga tidak bisa mengelola rutinisasi perilakunya karena tercipta dysfunctional factionalism (disfungsional faksionalisme) di internal yang membuat partai politik sulit untuk menjadi aktor politik yang tunggal akibat pertarungan faksi-faksi (Sholikin 2018). Pada kasus tertentu, didapati bahwa faksionalisasi didalam partai kerap berujung eksodus secara masif dari partai, lalu mendirikan partai-partai baru yang selanjutnya dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungannya sistem kepartaian dan dan stabilitas politik (Pora, 2014). Sangatlah wajar jika dinamika internal partai selalu tinggi, apalagi jika terkait dengan perebutan kekuasaan kepemimpinan partai. Pergantian pemimpin partai menjadikan kader-kader dari internal partai saling bersaing memperebutkannya. Hal ini dapat memicu munculnya faksifaksi di dalam internal partai dalam menyikapi pergantian kepemimpinan partai. Dalam studi tentang faksionalisme intra partai, perkembangan faksi-faksi didalam partai sangat ditentukan oleh faktor internal partai maupun faktor eksternal partai seperti setting sosial dan politik. Perbedaan konteks sosial dan politik dapat memberikan perubahan pola faksonalisme yang terjadi didalam internal partai.

Pada konteks politik di Indonesia pasca transisi demokrasi Tahun 1998, faktor eksternal terkait kondisi setting sosial dan politik sangat berpengaruh terhadap pola faksionalisme partai. Konteks transisi demokrasi di Indonesia pasca tumbangannya rezim Soeharto, setidaknya ada dua agenda utama reformasi, yaitu perubahan sistem kepartaian dan pemilu ulang. Sistem kepartaian merupakan agenda utama reformasi dalam mengembalikan hak-hak politik masyarakat Indonesia yang telah lama dimonopoli oleh partai penguasa Orba melalui pendirian partai baru. Sedangkan pemilu menjadi agenda utama reformasi dalam proses pergantian (*transplacement*) pemerintahan baru atau rezim demokratik menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang.

Dalam sebuah kasus yang penulis teliti bahwa terjadi sebuah konflik prahara kepemimpinan yang terjadi di partai Golkar Kalimantan Timur. Munculnya surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar perihal persetujuan Pengganti Antarwaktu (PAW) Isinya berupa persetujuan Pengganti Antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kaltim Periode 2019-2024. Makmur HAPK berganti menjadi Hassanuddin Masud yang menjabat ketua Komisi III DPRD Kaltim. Munculnya surat ini membuat gesekan yang berujung konflik internal di dalam partai politik Golkar. Munculnya faksi faksi didalam internal partai Golkar yaitu pendukung Makmur HAPK dan Pendukung Hassanudin Masud. Tuntutan pergantian ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hassanuddin Mas'ud yang juga kakak dari Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas'ud, disebut akan memengaruhi capaian Partai Golkar di kontestasi politik mendatang. Faksionalisasi partai politik yang muncul akibat faksi faksi didalam internal partai politik memang lumrah terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena partai politik bukanlah sebuah entitas tunggal yang memiliki tujuan dan consensus politik yang monolitik. Akan tetapi, partai politik merupakan sebuah entitas kolektif yang sarat dengan kompetisi dan pluralitas kepentingan diantara individu-individu didalamnya sehingga melahirkan sebuah pandangan, tujuan, dan kepentingan yang berbeda antara satu sama lain. Konsensus politik diantara individu-individu didalam partai yang memiliki pandangan, tujuan dan kepentingan yang sama akan terbentuk sebuah "blok" atau kelompok didalam partai politik. Blok inilah yang disebut dengan faksi di internal partai politik (Ceron, 2017).

Salah satu bagian dari konseptualisasi faksionalisme internal partai adalah tipologi faksi-faksi yang muncul didalamnya. Penjelasan mengenai tipe atau karakter khusus yang dibangun didalam faksi dapat dilihat dari sifat khusus organisasi faksi yang terbentuk atas dasar factor-faktor tertentu. Dalam hal ini, tipe faksi yang sering kali muncul ada tiga bentuk, yaitu (1) faksi yang terbentuk atas dasar kepentingan (factions of interest), (2) faksi yang terbentuk atas dasar hubungan personal (factions of personalized), dan (3) faksi yang terbentuk atas aturan organisasi yang terikat secara institusional (factions of institutionalized) (Basedau & Kollner, 2005). Dari ketiga pola faksionalisme internal partai tersebut, faksi “kepentingan” dan faksi “personal” adalah pola faksi yang sering kali dijumpai dalam dinamika partai politik yang ada didalam negara berkembang atau negara yang demokrasinya belum mapan. Sedangkan pola faksi “institusionalisasi” hanya terdapat didalam dinamika internal partai politik di negara yang sistem demokrasinya telah mapan (Basedau & Kollner, 2005).

Oleh karena itu, penjelasan mengenai faksi “kepentingan” dan faksi “personal” menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini. Pola paling sederhana didalam dinamika faksionalisme internal partai adalah pola faksionalisme yang dibentuk atas dasar “kepentingan”(factions of interest). Di dalam jenis faksionalisme seperti ini, faksi yang ada merupakan faksi yang dibentuk dengan tanpa terorganisir secara matang dan cenderung mengejar sebuah isu tertentu untuk memenangkan kepentingan kelompok mereka. Karakter dasar dari pola faksionalisme jenis ini adalah adanya isu-isu strategis yang sedang diperjuangkan tanpa adanya organisasi secara matang yang ada didalam masing-masing faksi. Karena tidak ada organisasi secara matang, faksi-faksi yang ada didalamnya tidak memiliki stuktur hierarkis yang jelas sehingga tidak mampu memiliki ruang publik secara formal. Selain itu, faksionalisme yang terjadi atas pola kepentingan tidak bisa berdiri pada batas waktu yang lama karena eksistensinya sejalan dengan isu-isu strategis yang sedang diperjuangkan (Rohman, 2015). Berdasarkan hal ini maka penulis memberikan sebuah pemetaan rumusan masalah yang mesti di analisis lebih dalam. Pertama Bagaimana Tipologi Faksionalisasi Partai Politik? Kedua, Bagaimana Pola Faksionalisasi Politik di Partai Golkar, Kalimantan Timur. Apa yang menjadi dasar terbentuknya faksi faksi didalam internal partai Golkar? Dan Konflik yang terjadi di Partai Golkar dapat di identifikasi masuk ke dalam faksionalisasi apa dan bagaimana dampaknya?

## METODE PENELITIAN

Artikel ini membahas tentang Faksionalisasi Politik Partai Golkar di Kalimantan Timur. maka untuk mendalami topik yang dibahas, penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur yang bersumber dari teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, selain itu bukti nyata dalam penelitian ini didukung oleh beberapa sumber media massa yang akurat dan terpercaya dalam melakukan penelitian yang mendalam. Tinjauan Literatur, yaitu mengkaji atau mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat dalam tubuh karya sastra yang berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis pada topik tertentu. Studi Pustaka (Literature Study) dan dibantu Google form. (Perhatikan data analisis 1).

**Tabel 1 Data Analisis Penelitian**

	Berita
<b>Kaltim Post</b>	<a href="https://kaltimpost.jawapos.com/utama/29/07/2022/konflik-kursi-ketua-dprd-kaltim-pasif-jadi-alasan-golkar-merotasi-makmur-hapk">https://kaltimpost.jawapos.com/utama/29/07/2022/konflik-kursi-ketua-dprd-kaltim-pasif-jadi-alasan-golkar-merotasi-makmur-hapk</a>
<b>Kaltim Prokal</b>	<a href="https://kaltim.prokal.co/read/news/392625-imbis-konflik-internal-pencopotan-makmur-sebagai-ketua-dprd-elektabilitas-golkar-terancam-merosot.html">https://kaltim.prokal.co/read/news/392625-imbis-konflik-internal-pencopotan-makmur-sebagai-ketua-dprd-elektabilitas-golkar-terancam-merosot.html</a>
<b>Media Kaltim</b>	<a href="https://mediakaltim.com/Prahara-Surat-Pergantian-Ketua-Dprd-Kaltim-Golkar-Kaltim-Memanas/">https://mediakaltim.com/Prahara-Surat-Pergantian-Ketua-Dprd-Kaltim-Golkar-Kaltim-Memanas/</a>
<b>Kaltim Kece.id</b>	<a href="https://kaltimkece.id/warta/politik/prahara-surat-pergantian-ketua-dprd-kaltim-sinyal-konflik-internal-golkar">https://kaltimkece.id/warta/politik/prahara-surat-pergantian-ketua-dprd-kaltim-sinyal-konflik-internal-golkar</a>

Sumber: Dikelola Penulis, (2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tipologi Faksionaisasi Partai Politik

Patrick Kolner & Matthias Basedau yang berjudul *Factionalism in Political Parties: An Analytical Framework for Comparative Studies*. Studi tentang faksionalisme politik didalam internal partai merupakan kajian tersendiri dalam teori partai politik. Faksionalisme politik merupakan sebuah keniscayaan didalam kebanyakan partai politik. Pola faksionalisme selanjutnya adalah faksionalisme yang terbentuk atas dasar hubungan personal (Factions of Personal). Pola faksionalisme personal sebenarnya hampir sama dengan pola faksionalisme yang terbentuk atas dasar “kepentingan” (Factions of interest) (Basedau & Kollner, 2005). Namun, yang membedakan dengan pola faksionalisme “kepentingan” adalah adanya kekuatan

personal yang muncul didalam faksi-faksi yang ada sehingga eksistensi faksi didalamnya tergantung pada eksistensi personal. Jenis pola faksionalisme “personal” sangat kental dengan jaringan klientalistik yang dibangun oleh patron yang ada didalam faksi. Dengan adanya “patron” didalam faksi maka sistem organisasinya cenderung “hierarkis” dan rantai komandonya bersifat vertical. Adapun identitas faksi-faksi yang ada didalam pola faksionalisme “personal” cenderung dilekatkan pada seorang yang memiliki sumber daya seperti pemimpin kelompok. Oleh karena itu, eksistensi faksi-faksi yang ada dalam pola faksionalisme “personal” sangat bergantung pada eksistensi pemimpin faksi (Basedau dan Kolner, 2005).

Studi tentang faksionalisme dalam partai partai telah banyak membahas tentang factor yang dianggap dapat mendorong muncul dan berkembangnya faksi, baik factor internal partai maupun factor eksternal seperti setting sosial dan politik. Adapun kombinasi kedua factor tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori (c). Pertama, dinamika dan struktur sosial-ekonomi dan politik secara umum. Dalam kondisi masyarakat yang ditandai oleh hubungan klientalistik yang kuat atau perpecahan yang tegas sering kali terlihat didalam factions of interest. Di sisi lain, tingkat pembangunan yang rendah dan meningginya kepentingan untuk mengakses sumber daya dapat memicu munculnya faksi. Pada tingkatan yang sama sekali berbeda, butuh isu politik khusus yang konfliktif (berpeluang menimbulkan konflik) untuk memicu munculnya faksi. Kedua, institusi formal Negara seperti sistem pemilu dan struktur negara. Karakteristik formal struktur negara dan sistem pemerintahan membentuk struktur pendorong yang berbeda pada pendirian faksi. Pemilihan presiden langsung yang dibantu dengan wewenang eksekutif yang kuat membawa bagian elemen pribadi ke dalam konflik politik sehingga memicu adanya factions of personalized. Pemilu dapat meningkatkan perbedaan dalam internal organisasi ketika pendukung berkumpul di sekitar kandidat yang menguntungkan dalam fase nominasi. Selain itu, sistem pemilihan proporsional memberikan kerangka institusional yang menyetujui pembentukan dan perkembangan faksi. Bahkan dalam beberapa kasus pada sistem pemilu majoritarian tidak menutup kemungkinan munculnya faksi. Ketiga, karakteristik sistem kepartaian dan partai. Adanya sistem kepartaian yang memberikan ruang bagi munculnya banyak partai baru dapat mempengaruhi pembentukan faksi. Karakteristik umum sistem kepartaian dapat juga mempengaruhi pembentukan faksi baik ditingkat polarisasi antar partai maupun konflik ideologi di



dalam partai. Dengan adanya sistem kepartaian tersebut, seringkali pembentukan faksi terjadi pada parta-partai besar yang berpotensi untuk melahirkan partai baru dari munculnya faksi baru di dalam partai tersebut. Oleh karena itu, fenomena faksionalisme sering kali terjadi pada partai besar atau dominan

Bagan 1 Terjadinya Faksionalisasi Partai Politik



Sumber: Dikelola Penulis dari Basedau & Kollner, (2005).

Kristalisasi faksionalisme merupakan puncak dari proses pembentukan faksifaksi yang ada didalam internal partai setelah melalui tiga tahapan, yaitu fragmentasi faksional, institusionalisasi faksional, dan Polarisasi faksional (Basedau & Kolner, 2005). Tahapan pertama dalam perkembangan faksi adalah fragmentasi faksionalisme. Pada tahap ini dapat dideteksi melalui jumlah faksi yang muncul apakah faksi yang muncul tersebut mengarah ke sistem faksionalisme bipolar (dua faksi) atau multipolar (ada banyak jumlah faksi). Sedangkan kekuatan faksi dalam tahap ini dapat dilihat apakah mengarah pada faksionalisme simetris yang kekuatan berimbang diantara faksifaksinya, atau faksionalisme (A-) simetris yang kekuatannya tidak berimbang. Selain itu, tekanan vertical faksionalisme pada tahap fragmentasi dapat dilihat melalui faksionalisme yang terjadi ditingkat pusat. Tahapan karakteristik faksionalisme yang kedua adalah institusinalisasi faksional. Tahapan ini merupakan proses institusionalisasi faksi-faksi yang ada sehingga mengerucut menjadi beberap faksi yang memiliki struktur organisasi yang jelas. Dalam tahap institusinalisasi faksional, derajat organisasi, daya tahan, dan kohesifitas (keterikatan) disesuaikan dengan pola faksionalisme yang ada (Buckler & Dolowitz, 2012). Pada pola faksionalisasi “kepentingan”, derajat organisasi, daya tahan, dan keosifitas cenderung rendah sehingga pola faksionalisme semacam ini cenderung tidak bertahan pada jangka waktu yang lama. Sedangkan pada pola faksionalisme “personal”, derajat



organisasi, daya tahan, dan kohesifitas cenderung sedang sehingga mampu bertahan dalam jangka yang cukup lama. Sedangkan pada pola faksionalisme “institusional”, derajat organisasi, daya tahan, dan kohesifitas cenderung tinggi sehingga mampu bertahan lama dibandingkan pola faksionalisme “kepentingan” dan “personal”. Tahapan karakteristik faksionalisme yang terakhir adalah polarisasi faksional (Campus, Switek, & Valbruzzi, 2021). Pada perkembangan faksionalisme tahap ini, faksi-faksi yang ada didalam partai sudah mengkristal menjadi faksi-faksi sendiri yang memiliki intensitas konflik cukup tinggi sehingga kemungkinan untuk tahap pemisahan sangat besar. Kristalisasi diantara faksifaksi yang ada didalam partai politik dapat diukur dari intensitas konflik antar faksi apakah cenderung tinggi atau rendah. Selain itu, pada tahap ini, bisa dilihat perbedaan ideologi yang ada diantara faksi-faksi. Dan yang terakhir adalah dinamika kompetisi interfaksional menjadi momentum utama didalam melihat eskalasi konflik yang terjadi diantara faksi-faksi yang ada apakah ada pemisahan atau tidak.

Muncul Konflik di Internal Partai Golkar Kaltim Antara Makmur HAPK dan Hasanudin Mas’ud Kursi Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK dari Partai Golkar tengah dalam prahara. Munculnya surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar perihal persetujuan Pengganti Antarwaktu (PAW) untuk posisi tersebut. Dari Makmur berganti Hasanuddin Masud. Posisi ketua DPRD Kaltim selama ini memang akrab dengan partai berlogo pohon beringin. Terlihat partai Golkar telah masuk dalam Pemilihan Legislatif 2004 dan bertahan selama 17 tahun dalam lima periode. Figur yang menduduki kursi tertinggi juga silih berganti. Setelah Pileg 2019, Makmur mengemuka sebagai ketua. Namun belakangan, posisinya mulai terusik dan Situasi makin panas setelah beredar surat berkop Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Beringin yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Kaltim nomor B-600/GOLKAR/VI/2021. Surat tersebut bercap biru basah dan telah ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Harto dan Sekretaris Jenderal, Loedjewik Paulus. Ramai beredar Sabtu, 19 Juni 2021. Isinya berupa persetujuan Pengganti Antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kaltim Periode 2019-2024. Makmur HAPK berganti menjadi Hassanuddin Masud yang menjabat ketua Komisi III DPRD Kaltim.

Menurut *kaltimkece.id*, Makmur HAPK enggan menjawab surat maupun isu pergantian tersebut. Alasannya, surat tersebut belum diberikan secara langsung kepadanya. Berdasarkan wawancara yang di himpun Kaltimkece.id “Mohon maaf, saya belum menerima secara langsung (surat tersebut). Nama saya juga tidak disebut di situ,” ungkap Makmur. Di sisi lain, Makmur menyorot surat keputusan tersebut yang tidak menjelaskan alasan pergantiannya. Dia membandingkan surat tersebut dengan surat penunjukan yang diterimanya saat diangkat menjadi ketua DPRD Kaltim. Di dalam surat penunjukan tersebut menyertakan alasan, dasar hukum, dan alamat surat yang sangat jelas terpampang. “Jadi kalau saya memberikan komentar, kesannya saya sudah menerima,” jawabnya singkat. Sekretaris DPD Golkar Kaltim, M Husni Fahrudin, mengatakan bahwa DPD Golkar Kaltim belum menerima surat resmi secara fisik maupun digital dari DPP Golkar mengenai PAW dimaksud. mengaku baru mengetahui hal tersebut dari media social (Gading, 2021).

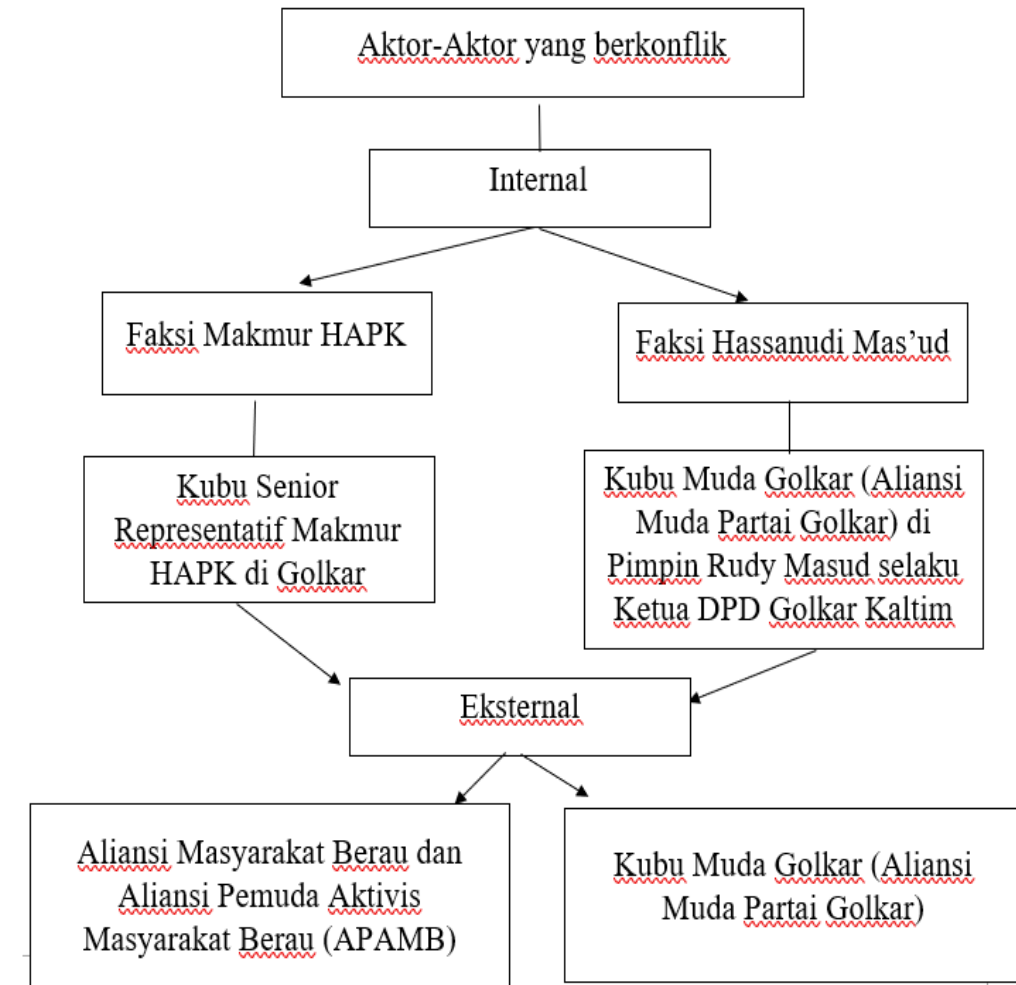
Masyarakat pun mulai resah melihat perhara konflik yang terjadi di internal partai golkar. Dihimpun dari krokal kaltim beberapa Masyarakat Berau yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APAMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman, Samarinda. Puluhan massa menyampaikan sejumlah tuntutan mereka terkait dengan rencana pergantian Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim. Koordinator APAMB, Jogras Hutain menyebutkan pihaknya menuntut Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas'ud untuk meminta maaf kepada Makmur HAPK. Setidaknya ada 7 poin tuntutan yang disampaikan APAMB di depan Sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim, satu diantaranya menolak rencana pergantian Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim. Selain itu juga mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mencabut Surat Nomor: B-600/Golkar/VI/2021. Kalau memang kedepannya terjadi konflik sosial karena perkara ini, maka Rudy Mas'ud selaku nahkoda Partai Golkar Kaltim harus bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi.

Beberapa yang ditelusuri Kaltimkece.id, Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, tak terkejut dengan kabar PAW yang berembus. Terlihat ada beberapa keganjilan dari persoalan tersebut. Pertama adalah isu yang berembus kencang di luar partai. Kedua, jarang sekali seorang tokoh diganti ketika memegang pucuk pimpinan sebuah lembaga, baik eksekutif maupun

legislatif. Ini lah yang tentu sangat dipertanyakan alasannya oleh publik. Pengamat politik dari Fisip Unmul menilai ada dua analisis objektif penyebab terjadinya konflik. Pertama, faktor persoalan individu. Faktor ini terjadi ketika suatu tokoh diterpa beberapa isu atau permasalahan. Seperti korupsi, pindah partai, atau menderita sakit penyakit ketika memimpin. Kedua, kemungkinan adanya konflik antara faksi-faksi di internal partai. Ia menilai fenomena tersebut kerap terjadi ketika beberapa poros berlomba-lomba merebut pucuk pimpinan. Melihat isu yang berkembang, diduga kuat isu tersebut berhembus karena faktor kedua. Yakni konflik golongan di internal Golkar Kaltim. Sambungnya ia mengatakan bahwa melihat karakter Makmur HAPK yang terkenal sangat loyal kepada partai dan menghindari konflik, sulit mengatakan ada persoalan individu yang serius.

Pengamat berinisial B tersebut menduga dua golongan di internal Golkar. Pertama adalah faksi Golongan muda yang dipimpin Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudi Masud dan faksi golongan senior yang direpresentasikan Makmur HAPK. Dua golongan itulah yang diduga kuat berebut puncak pimpinan partai beringin. “Dalam konteks sekarang, bisa diduga inilah faksinya, karena representasi golongan yang terlihat di publik terlihat dalam dua figur tersebut,” tegasnya Meskipun demikian, Soal konflik Golkar Kalimantan Timur yang kian tajam, Mukmin juga berendapat ada pihak yang sengaja mempertajam konflik itu. “Tajam ya ada yang tajam-tajamin. Sebenarnya nggak tajam,” tandasnya. Diketahui Persaingan kursi DPD Golkar Kalimantan Timur makin panas diperebutkan. Terdengar ada dua kubu yang bertarung yakni kubu muda dan kubu lama Bahkan kubu muda ini mulai menggalang kekuatan untuk mematahkan kepemimpinan yang ada saat ini di Kalimantan Timur (Gading, 2021).

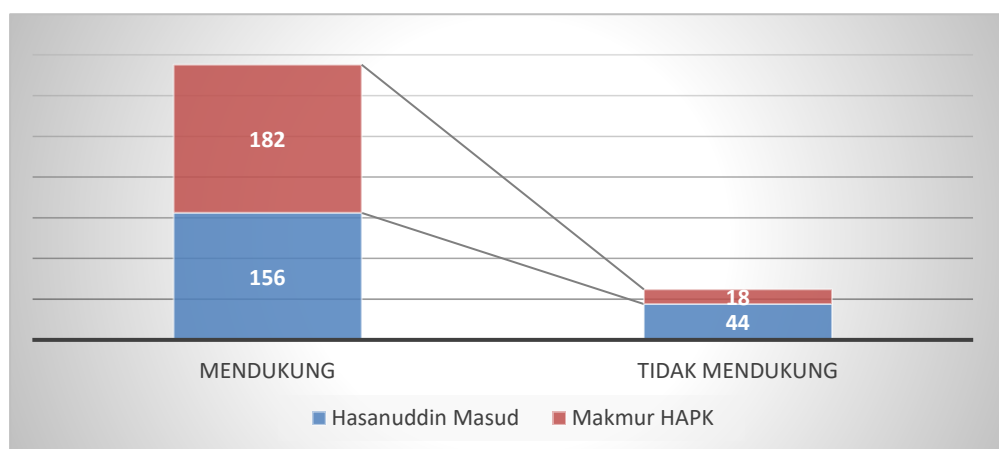
**Peta 1 Konflik di Internal Partai Golkar Kaltim Antara Makmur HAPK dan Hasanudin Mas'ud**



Sumber Dikeloa Penulis, (2022).

Konflik ini diperkuat menurut Kaltim post, (2021), Minimnya keaktifan berorganisasi Makmur HAPK jadi salah satu dasar Golkar merotasinya dari kursi pimpinan di Karang Paci. Tidak terima persoalan itu Makmur HAPK menggugat empat pihak atas rotasi pimpinan ketua DPRD Kaltim yang ditempuh DPD Golkar Kaltim pada 16 Juni 2021. Golkar memutuskan mengganti dirinya sebagai ketua dewan dan menempatkan Hasanuddin Mas'ud. Lewat gugatan bernomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr ini, Makmur menggugat DPP Golkar, khususnya Airlangga Hartanto dan Lodewijk F Paulus, DPD Golkar Kaltim khususnya Rudy Mas'ud dan Husni Fahrudin, Fraksi Golkar di DPRD Kaltim khususnya Andi Harahap dan Nidya Listiyono, dan Hasanuddin Mas'ud.

Kembali ke persidangan, Hendra menjelaskan, minimnya partisipasi Makmur itu punya bukti sah. Yakni, dari puluhan rapat internal partai baik di DPD atau Fraksi-Golkar di DPRD Kaltim, Makmur hanya sekali mengikuti. Ketika ditanya kuasa hukum Golkar Lasila soal rapat-rapat tersebut, apakah menyertakan undangan untuk menginformasikan ke setiap peserta rapat internal, Hendra menegaskan banyak informasi yang disebar pengurus DPD atau F-Golkar untuk setiap kegiatan internal itu. Dari undangan fisik, informasi resmi di website pribadi partai, hingga salinan digital yang dikirim ke setiap aplikasi WhatsApp masing-masing pengurus. Berdasarkan dua hal itu, minim partisipasi dan komunikasi membuat F-Golkar mengusulkan perotasian kursi pimpinan Golkar di dewan. Surat usulan fraksi yang masuk ke DPD Golkar Kaltim sempat ditelaah barulah diteruskan ke Ketua DPD Golkar Kaltim Rudi Mas`ud. Dari ketua diminta untuk diplenokan. Hasil pleno dan Usulan fraksi diproses selanjutnya diteruskan ke DPP dan disetujui. Salah satu pertimbangan pusat menyetujui perotasian itu juga karena tenggang waktu kader yang jadi perwakilan di parlemen memang memasuki pertengahan masa jabatan periode 2019–2024 (Kaltim post, 2021). Walaupun begitu berdasarkan hasil kajian melalui bantuan Google form yang dilakukan melalui survei lapangan dengan responden sebesar 200 orang yang dilakukan secara accidental melalui google form dengan menyasar berbagai masyarakat dan akademisi. Membuktikan bahwa Makmur HAPK memiliki potensi tetap bertahan untuk menjadi ketua DPRD Kaltim. Ini disebabkan oleh kinerja yang dihasilkan Makmur selama ini terbilang baik. Sedangkan rivalnya sedikit memiliki dukungan untuk mampu mengulingkan Makmur sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur.



Grafik 1 Persepsi Publik Pergantian Antar Waktu Terhadap Aktor Berkonflik

Sumber: Dikelola Penulis (2022).

Berdasarkan hal ini penulis menilai bahwa tuntutan pergantian ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas'ud kemungkinan akan memengaruhi capaian Partai Golkar di kontestasi politik mendatang. Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Lutfi Wahyudi mengungkapkan, keputusan DPRD Kaltim dari hasil rapat paripurna pekan lalu memang cacat hukum. Sehingga, idealnya tak bisa diteruskan ke mendagri. Lutfi mengatakan, perlu digarisbawahi dan diketahui publik, saat ini Makmur HAPK tengah mengajukan upaya hukum soal keputusan DPP Golkar yang mencopotnya sebagai ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024. Secara hukum, sambung dia, putusan Mahkamah Partai Golkar yang menolak gugatan Makmur terkait keputusan pencopotan itu, menjadi dasar menggugat keputusan DPP Golkar ke Pengadilan Negeri.

Secara politik, DPP Golkar dinilai Lutfi memang melakukan tindakan kurang tepat karena memilih keputusan ini. Sebab, membawa konflik ke Partai Golkar di Kaltim yang saat ini tengah berkonsolidasi. Selain itu, tindakan Fraksi Golkar di DPRD Kaltim juga dinilai cenderung tak sabar dan memaksakan untuk memaripurnakan penggantian Makmur ke Hasanuddin Mas'ud. Padahal, kondisinya dari perspektif hukum keputusan itu cacat hukum. Hasil keputusan yang dinilai cacat hukum itu pun dikirim ke Pemprov Kaltim untuk diteruskan ke mendagri. Di sini, ucap Lutfi, posisi Pemprov Kaltim dilema. Pemprov bisa saja langsung meneruskan surat dari DPRD Kaltim ke mendagri perihal pergantian itu. Tetapi, apabila Pemprov Kaltim meneruskan surat itu, Kementerian Dalam Negeri bisa saja menyoal sikap pemprov karena meneruskan surat yang cacat hukum. "Lalu yang kedua, seperti yang sudah disampaikan pak Wagub, mereka menunggu keputusan inkrah dari pengadilan," jelasnya. Sementara itu, pernyataan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim Nidya Listyono yang mengatakan akan langsung mengirim surat ke mendagri jika Pemprov Kaltim tak memproses surat mereka, disebut Lutfi juga tak tepat. Sebab, tak ada aturan yang mendukung itu. Sebab pemprov adalah bagian pemerintah pusat, dalam hal Kemendagri di daerah "Salah satu syarat ke mendagri itu tidak ada konflik lagi, misal tak ada gugatan dari pengadilan negeri. Itu ditunjukkan dengan surat dari pengadilan. Jadi, ranah hukum harus inkrah," sambung dia. Lutfi menjelaskan, opsi lain Pemprov Kaltim bisa melakukan pembinaan politik atau menjadi fasilitator terkait konflik ini. Dijelaskan Lutfi, adanya konflik ini menjadi hal yang kontraproduktif bagi Golkar. Semua parpol lagi sibuk melakukan konsolidasi untuk kontestasi politik

selanjutnya, namun Golkar malah sibuk dalam konflik pergantian pucuk pimpinan DPRD. Lutfi tak menampik, ngototnya fraksi saat ini tentu saja ada kepentingan dan tekanan tertentu (Kaltimprokal, 2021).

Menggoyang posisi Makmur HAPK yang notabene peraih suara terbanyak di DPRD Kaltim dan memiliki ketokohan di Kaltim, bisa berakibat pada raihan suara Partai Golkar. Hal ini pun bisa tak sejalan dengan target Golkar untuk memenangkan sejumlah pemilihan kepala daerah. Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar Nidya Listiyono menyampaikan, pihaknya akan menunggu selama tujuh hari ke depan terkait sikap Pemprov Kaltim. “Kami dari fraksi minta tetap dikirimkan sesuai undang-undang. Tujuh hari jika tidak ditindaklanjuti, kami juga akan bersurat ke mendagri,” sebut lelaki yang akrab disapa Tio itu. Dia berharap, gubernur bisa menghormati proses yang sudah berlangsung. Diwartakan sebelumnya, terkecuali Gerindra yang memilih walkout pada rapat paripurna 2 November lalu, para peserta rapat sepakat Hasanuddin Mas’ud menggantikan Makmur HAPK sebagai ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024. Wakil Ketua DPRD Kaltim M Samsun mengatakan, pekan ini, surat pergantian itu akan diselesaikan untuk disampaikan ke Pemprov Kaltim agar diteruskan ke menteri Dalam Negeri. Upaya pergantian tersebut sejauh ini tampaknya tidak akan mulus. Setelah gagal di Mahkamah Partai DPP Golkar, Makmur kini menggugat perombakan alat kelengkapan dewan (AKD) itu ke Pengadilan Negeri Samarinda lewat gugatan perdata. Dalam gugatan bernomor 204/Pdt.G/2021/PN Smr itu, Makmur meminta Pengadilan Negeri Samarinda menganulir Surat Keputusan (SK) DPP Golkar No B-600/Golkar/VI/2021 yang terbit pada 16 Juni 2021. Hal itulah yang membuat Pemprov Kaltim memilih menunda memproses penggantian Makmur ke Hasanuddin Mas’ud. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, Gubernur Isran Noor berpesan kepadanya, bahwa surat dari DPRD Kaltim tidak akan ditindaklanjuti ke mendagri apabila putusan terkait gugatan hukum Makmur belum inkrah (Kaltimprokal, 2021).

### **Identifikasi Faksionalisasi Partai Politik di Prahara Konflik Golkar, Kaltim**

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa faksi sejatinya dibutuhkan dalam transformasi politik yang berfungsi sebagai kelompok yang mengambil peranan dalam keseimbangan politik (Maliki, 2018)). Di level partai politik, faksi juga muncul sebagai bagian dari perilaku pragmatis dan mencari keuntungan. Sebagai sebuah



kelompok kepentingan, dalam partai politik, faksi dimaknai sebagai kelompok terstruktur dalam partai politik yang mencari, atau sekurang-kurangnya mengendalikan posisi pengambilan keputusan yang otoritatif dari partai. Faksi sebagai kelompok terstruktur yang membentuk pola mapan dalam perilaku dan interaksi untuk anggota faksi sepanjang waktu (Budiatri et al, 2018). Ciri-ciri faksi dalam partai politik terdiri dari kelompok yang diwakili oleh proyeksi ambisi individu yang sangat mirip dengan geng politik, jontos, dan pengelompokan keluarga yang mendominasi politik. Dalam kasus terbentuknya faksi dalam intra partai, interaksi politik para aktor politik secara individu dalam partai seperti legislator, kandidat, pejabat yang ditunjuk dan anggota yang memiliki motivasi memimpin secara beragam sebagai bentuk perilaku bersaing (Suparlan, 2014).

Penyebab munculnya faksionalisasi dalam empat alasan. Pertama, kesuksesan partai dan persaingan internal. Partai yang sukses dalam pemilu justru menjadi daya tarik bagi politisi yang memiliki keinginan tinggi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, mengklaim kesuksesannya dan menekan sumber daya pendukungnya sendiri. Situasi ini akan mendorong dinamika persaingan yang ketat sehingga mempertajam penguatan berbagai faksi yang memiliki kepentingan yang sama. Kesuksesan suatu partai dalam pemilu akan memberikan motivasi yang sangat besar dalam perebutan posisi internal (Boucek, 2009). Kedua, Heterogenitas, konflik ideologi dan resiko Perpecahan. Beragamnya sifat heterogenitas partai yang dominan berkuasa akan meningkatkan tekanan konflik terhadap klaim kebijakan ideologis yang pada gilirannya, meningkatkan risiko pembagian ideologis dan perpecahan. Ketika menguatnya salah satu faksi dalam partai politik di tengah tumbuhnya bermacam-macam faksi lainnya akan mendorong perbedaan keinginan, kepentingan dan tujuan. Jika tidak mampu dikelola dengan baik atas perbedaan tersebut, justru partai akan terancam ke arah perpecahan internal (Boucek, 2009). Ketiga, Perebutan posisi kunci yang terbatas untuk menunjang politik karir. Berkaitan dengan poin kedua, partai-partai politik yang dominan biasanya dijadikan sebagai tujuan perebutan karir politik. Akibatnya partai yang dominan itu menjadi tujuan utama para pencari kekuasaan dan tipe politisi karir. Meskipun disadari bahwa formasi kekuasaan yang tersedia tidak akan mampu memenuhi naluri pencarian kekuasaan berbagai faksi yang ada dalam partai. Pencari kekuasaan seperti politisi karir memahami situasi terbatasnya jumlah posisi yang diinginkan, namun member daya tarik sebagai partai

dominan (Boucek, 2009). Keempat, Motivasi kesejahteraan dalam dilemma kolektivitas partai vs individu. Kesejahteraan partai politik akan mengubah keseimbangan antara tujuan kolektif partai dengan tujuan karir individu. Bahwa para Politisi karir menciptakan risiko loyalitas terbagi dan mengakar dalam jangka panjang, sehingga memungkinkan dapat mengalahkan kepentingan kolektif partai. Motivasi kesejahteraan mendorong munculnya faksi-faksi. Artinya faksi sebagai sebuah cara politisi partai dalam memperoleh asas manfaat kesejahteraan, meskipun disadari bahwa hal itu akan mengorbankan kebersamaan dan kesatuan nilai dalam partai. Kesejahteraan akan memantik faksi tercerabut dari ciri khas awal sebagai kekuatan yang kolektif berubah ke orientasi individu (Boucek, 2009). Selain keempat faktor munculnya faksionalisasi, dalam konteks Keindonesiaan, ada dua hasil kesimpulan yang dapat dikemukakan terkait dengan hal yang sama. Dalam konteks Indonesia ditemukan tiga penyebab perpecahan internal partai politik yaitu (1) kegagalan menciptakan kepemimpinan yang baik; (2) ketidakmampuan untuk membangun sistem internal yang adil; (3) keberadaan elite-elite partai yang pragmatis. Selain itu, dalam konteks dinamika partai di Indonesia (Budiatri et al, 2019).

Temuan lainnya terungkap bahwa ada 6 penyebab munculnya faksi pada partai politik yakni (1) kesamaan atribusi nilai dan ideologi antar anggota partai; (2) kompleksitas aspek sosiologis anggota partai (struktur kelas, usia, pendidikan); (3) sistem kepartaian dan sistem pemilu; (4) pengelolaan keuangan partai dan kerja kampanye partai; (5) proses seleksi dan pemilihan internal untuk struktur kepengurusan partai yang tertutup; (6) gaya kepemimpinan elit partai yang otonom dapat menghasilkan dua dampak yaitu mendorong terbentuknya disiplin partai dan mencegah perpecahan partai, dan dapat membuat konflik partai semakin menajam karena elit cenderung menggunakan faksi pendukungnya untuk memperkuat kekuasaan dan kepemimpinan politiknya sendiri (Budiatri et al, 2018). Akibat yang ditimbulkan terhadap faksionalisasi internal partai ternyata memiliki hasil yang berbeda-beda, tergantung pada rute yang ditempuh serta dinamika politik yang dialami oleh internal partai. Faksionalisme sebagai fenomena multifaset akan bermuara pada 3 Implikasi wajah faksionalisme yang berbeda, yaitu (1) kooperatif, (2) kompetitif dan (3) generatif (Boucek, 2009). Pertama, faksionalisme kooperatif ditandai oleh pembentukan partai dan perubahan rezim yang terbangun berdasarkan hasil kesepakatan bersama atau konsensus. Selain itu faksi ini berupaya memfasilitasi

agregasi kapasitas partai politik sambil menjaga identitas sub kelompok, struktur faksi sebagai instrumen dalam kerjasama intra-partai agar terintegrasi). Kedua, faksionalisme kompetitif sebagai perpecahan partai politik kedalam faksi yang saling bertentangan, perselisihan intra-partai, perbedaan pendapat, opini partai yang terpolarisasi maupun sangat terpolarisasi dan terfragmentasi dalam tarikan sentrifugal ke dalam partai. Tarikan sentrifugal ini akan berdampak menguatnya perpecahan dan berpotensi melahirkan partai politik yang baru (Boucek, 2009). Ketiga, Faksionalisme degeneratif. Faksi ini terjadi ketika aktor-aktor lebih memilih memaksimalkan dan mencari keuntungan dalam distribusi patronase. Menguatnya Privatisasi daripada kolektivitas internal partai akan mendorong dan memicu siklus destruktif faksionalisme ke arah disintegrasi partai. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa persaingan faksi dalam internal partai akan membuka babak baru tentang perpecahan. Jika kondisi partai yang buruk ini tidak dipulihkan maka berbagai bentuk kerja sama digantikan dengan perebutan yang mengancam stabilitas partai dan mengiring ke arah degeneratif. Sebagai contoh skema faksionalisasi partai politik yang terjadi pada PKB dan PKN, menurut hasil penelitian Rohman (2015) mengatakan bahwa Lahirnya PKNU Ini jelas bentuk faksionalisasi yang terjadi di PKB. Lahirnya PKNU menjadi bukti bahwa faksionalisasi di tubuh PKB tidak dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik. Ini merupakan indikasi bahwa organisasi parpol tidak adaptif dengan perbedaan pandangan dan garis politik di PKB. Dengan demikian, bisa jadi mengatakan bahwa proses pelemahan PKB belum kokoh dan kuat dalam mengelola bergejolak dinamika dalam tubuhnya sendiri. Selanjutnya faksionalisasi di Partai Demokrat, menurut Firmansyah (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Faksionalisasi di Partai Demokrat ini sudah muncul ketika diadakannya Kongres Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang dimenangkan oleh kubu Anas Urbaningrum, dimana kemenangan ini diperoleh setelah mengalahkan dua kompetitornya yaitu Andi Malarangeng dan Marzuki Ali. Faksionalisasi di PD semakin menguat setelah terkuaknya berbagai kasus korupsi yang melibatkan beberapa petinggi PD. Secara teoritis pola faksionalisasi di PD ini karena adanya pola patron-klien berdasarkan karismatik tokoh yang dibarengi dengan basis- basis kekuatan sosial. Dampak utama dari adanya faksionalisasi ini adalah terjadinya pelemahan konsolidasi dan solidaritas antar kader-kader PD sehingga berkonsekuensi melemahkan organisasi internal partai dan elektabilitas partai di mata masyarakat.

Jika dilihat dari kasus skema faksionalisasi maka perpecahan ternyata menjadi fenomena dari berbagai sisi yang berubah dari waktu ke waktu dan menyebabkan pergeseran pola persaingan antar faksi dan kerjasama pada partai politik (Boucek, 2009). Berbagai kondisi dapat mengarah ke perebutan faksi dan transformasi faksionalisme dari proses kerjasama dengan salah satu kompetisi lalu mengalami kemunduran. Fenomena ini pada partai politik tertentu ditemukan kasus sangat terfragmentasi, dan pada pihak lainnya lebih terkonsentrasi, dan terdesentralisasi yang dimana tidak terlepas dari factor patron-klien (Pratama et al, 2019). Kunci terbentuknya konflik faksi intrapartai mengerucut pada perebutan kepemimpinan (Boucek, 2009). Akibat yang ditimbulkan dari faksionalisasi dapat melanggar legitimasi dan efisiensi sistem politik yang demokratis. Konsekuensi dari faksionalisme intra-partai, menimbulkan perpecahan partai dan bahkan sebagai fenomena 'patologi politik'. Faksionalisme juga dapat mengakibatkan keputusan intra-partai pada personil yang tidak berdasarkan pada prestasi dan kemampuan orang-orang yang terlibat tetapi berdasarkan pada afiliasi faksinya (Basedau & Kollner, 2005). Konflik intra-partai berbasis faksi juga dapat mengaburkan posisi partai sehingga membuat partai lebih sulit bagi keputusan pemilih. Singkatnya, faksi intra-partai dapat merusak atau melemahkan otoritas moral dan integritas pihak individu atau sistem partai secara keseluruhan (Basedau & Kollner, 2005).

Berdasarkan Literature diatas maka dapat diambil sebuah benang merah terkait konflik yang terjadi di internal partai Golkar yaitu penulis mengidentifikasi bahwa konflik yang terjadi di partai golkar membuat faksi-faksi yang berujung pada konflik semakin tajam. Konflik yang terjadi bisa dikategorikan dalam faksionalisasi kompetitif. Munculnya faksi bisa disebabkan karena adanya Perebutan posisi kunci yang terbatas untuk menunjang politik karir dan ini biasanya tidak terlepas karena adanya pengaruh kepentingan elit-elit yang pragmatis. Selain itu penulis mengidentifikasi bahwa konflik ini juga muncul karena adanya motivasi kesejahteraan dalam dilema kolektivitas partai vs individu. Kesejahteraan partai politik akan mengubah keseimbangan antara tujuan kolektif partai dengan tujuan karir individu. Bahwa para Politisi karir menciptakan risiko loyalitas terbagi dan mengakar dalam jangka panjang, sehingga memungkinkan dapat mengalahkan kepentingan kolektif partai. Motivasi kesejahteraan mendorong munculnya faksi-faksi.

Faksionalisasi yang menggerogoti tubuh partai tidak bisa dihindari ketika partai itu dibentuk dari berbagai kekuatan struktur sosial, sistem kepartaian, seleksi internal pengurus dan gaya kepemimpinan partai yang cenderung elitis. Stabilitas internal partai politik sangat bergantung pada derajat demokratisasi intra partai, mendorong faksi-faksi mampu bekerjasama dalam mengatur kepentingan internal maupun sebagai intermediasi kebijakan publik antara masyarakat dengan pemerintah. Namun, konflik dan perpecahan internal partai tidak bisa dihindari ketika pengurus tidak mampu membangun system internal yang adil, bahkan elite partai lebih mengedepankan pencarian keuntungan. Dalam kondisi seperti akan mendorong faksi-faksi bersaing karena tujuan mengejar keuntungan seringkali menjadi pemicu konflik internal. Jika persaingan itu mampu dikendalikan dengan baik, maka keberlanjutan dan eksistensi partai politik dapat dipertahankan. Dampak positifnya faksi-faksi yang berkompetisi bisa menemukan derajat demokrasi intra-partai ketika menjaga keseimbangan kekuatan internal dan mampu pemulihan kondisi politik ketika persaingan terjadi. Namun partai dapat saja mengalami kemunduran, atau bahkan kehancuran, kekalahan pada pemilu ketika persaingan antar faksi di dalam internal mengalami pergolakan yang tidak mampu dikendalikan. Bahkan koalisi faksi bersifat tidak stabil yang berakibat fatal pada macetnya intra-partai maupun kebijakan publik partai yang menyimpang. Kondisi tersebut hanya bisa diatasi jika masing-masing faksi yang bertikai kembali mengedepankan nilai-nilai demokrasi intra partai agar memulihkan kondisi partai pada derajat partai yang stabil dan terpadu atas sub kelompok partai.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil temuan bahwa konflik yang terjadi di internal partai Golkar yaitu melibatkan faksi Golongan muda yang dipimpin Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudi Masud dan faksi golongan senior yang direpresentasikan Makmur HAPK. Dalam konteks tersebut. inilah yang menyebabkan kecenderungan disebutkan adanya faksi dalam internal partai Golkar, karena representasi golongan yang terlihat di publik terlihat dalam dua figur tersebut. Konflik yang terjadi juga ada indikasi pihak yang sengaja mempertajam konflik di internal partai Golkar. Adanya kubu yang bertarung yakni kubu muda dan kubu lama (Senior). Bahkan kubu muda ini mulai menggalang kekuatan untuk mematahkan kepemimpinan yang ada saat ini di Kalimantan Timur khususnya dalam menggantikan Makmur HAPK menjadi ketua DPRD Kaltim.

Konflik yang terjadi bisa dikategorikan dalam faksionalisasi kompetitif. Munculnya faksi bisa disebabkan karena adanya perebutan posisi kunci yang terbatas untuk menunjang politik karir dan ini biasanya tidak terlepas karena adanya pengaruh kepentingan elit-elit yang pragmatis. Selain itu penulis mengidentifikasi bahwa konflik ini juga muncul karena adanya motivasi kesejahteraan dalam dilemma kolektivitas partai vs individu. Kesejahteraan partai politik akan mengubah keseimbangan antara tujuan kolektif partai dengan tujuan karir individu. Bahwa para Politisi karir menciptakan risiko loyalitas terbagi dan mengakar dalam jangka panjang, sehingga memungkinkan dapat mengalahkan kepentingan kolektif partai. Motivasi kesejahteraan mendorong munculnya faksi-faksi. Konflik yang terjadi di Partai Golkar Kaltimpon teridentifikasi ketika aktor-aktor lebih memilih memaksimalkan dan mencari keuntungan dalam distribusi patronase. Menguatnya Privatisasi daripada kolektivitas internal partai akan mendorong dan memicu siklus destruktif faksionalisme ke arah disintegrasi partai. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa persaingan faksi dalam internal partai akan membuka babak baru tentang perpecahan. Jika kondisi partai yang buruk ini tidak dipulihkan maka berbagai bentuk kerja sama digantikan dengan perebutan yang mengancam stabilitas partai dan mengiring ke arah degeneratif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basedau, M., & Köllner, P. (2005). Factionalism in political parties: an analytical framework for comparative studies.
- Boucek, F. (2009). Rethinking factionalism: typologies, intra-party dynamics and three faces of factionalism. *Party politics*, 15(4), 455-485.
- Buckler, S., & Dolowitz, D. (2012). Ideology matters: Party competition, ideological positioning and the case of the conservative party under David Cameron. *The British Journal of Politics and International Relations*, 14(4), 576-594.
- Budiatri, A. P., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Darmawan, D., & Hanafi, R. I. (2018). Faksi dan konflik internal partai politik di Indonesia era reformasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiatri, A. P., Mengko, D. M., Noor, F., Gayatri, I. H., Nurhasim, M., Haripin, M., ... & Permana, Y. S. (2019). Menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Campus, D., Switek, N., & Valbruzzi, M. (2021). *Collective leadership and divided power in West European Parties*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Ceron, A. (2017). *Social media and political accountability: Bridging the gap between citizens and politicians*. Springer.

Firmansyah, F. A. (2015). Wajah Faksionalisasi di Tubuh Partai Demokrat. *Jurnal Transformatif*, 1(1), 44-54.

Gading, S. (2021). Prahara Surat Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Sinyal Konflik Internal Golkar?. Di akses pada <https://kaltimkece.id/warta/politik/prahara-surat-pergantian-ketua-dprd-kaltim-sinyal-konflik-internal-golkar>

Kaltimpost. (2021). Konflik Kursi Ketua DPRD Kaltim, Pasif Jadi Alasan Golkar Merotasi Makmur HAPK .Diakses pada <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/29/07/2022/konflik-kursi-ketua-dprd-kaltim-pasif-jadi-alasan-golkar-merotasi-makmur-hapk>

Kaltimprokal. (2021). Imbas Konflik Internal Pencopotan Makmur sebagai Ketua DPRD, Elektabilitas Golkar Terancam Merosot .Diakses pada <https://kaltim.prokal.co/read/news/392625-imbis-konflik-internal-pencopotan-makmur-sebagai-ketua-dprd-elektabilitas-golkar-terancam-merosot.html>

Maliki, Z. (2018). *Sosiologi politik: makna kekuasaan dan transformasi politik*. Ugm Press.

MediaKaltim. (2021). Prahara Surat Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Golkar Kaltim Memanas. Di akses pada <https://mediakaltim.com/Prahara-Surat-Pergantian-Ketua-Dprd-Kaltim-Golkar-Kaltim-Memanas/>.

PRATAMA, P. Y., Budiman, B., & SARMIASIH, M. (2019). A comparative political analysis between the new order regime and the reformed era in Indonesia: A case study of oligarchy politics in the mining industry of East Kalimantan. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 10(3), 194-207.

Pora, R. (2014). *Konflik Elit Dalam Kontestasi Kekuasaan Internal Partai Politik* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Rohman, A. Z. F. (2015). Kristalisasi Fakisonalisme PKB dan PKNU Pasca Pemilihan Presiden 2004. *Jurnal Transformatif*, 1(1), 21-33.

Sholikin, A. (2018). Perbedaan Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah Antara Pusat Dan Daerah. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 3(2).

Suparlan, P. (2014). *Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya*. Antropologi Indonesia.